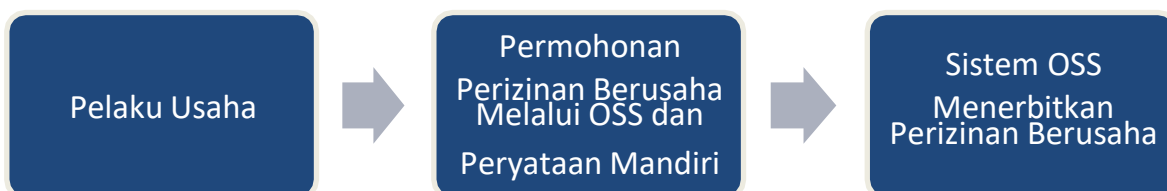


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

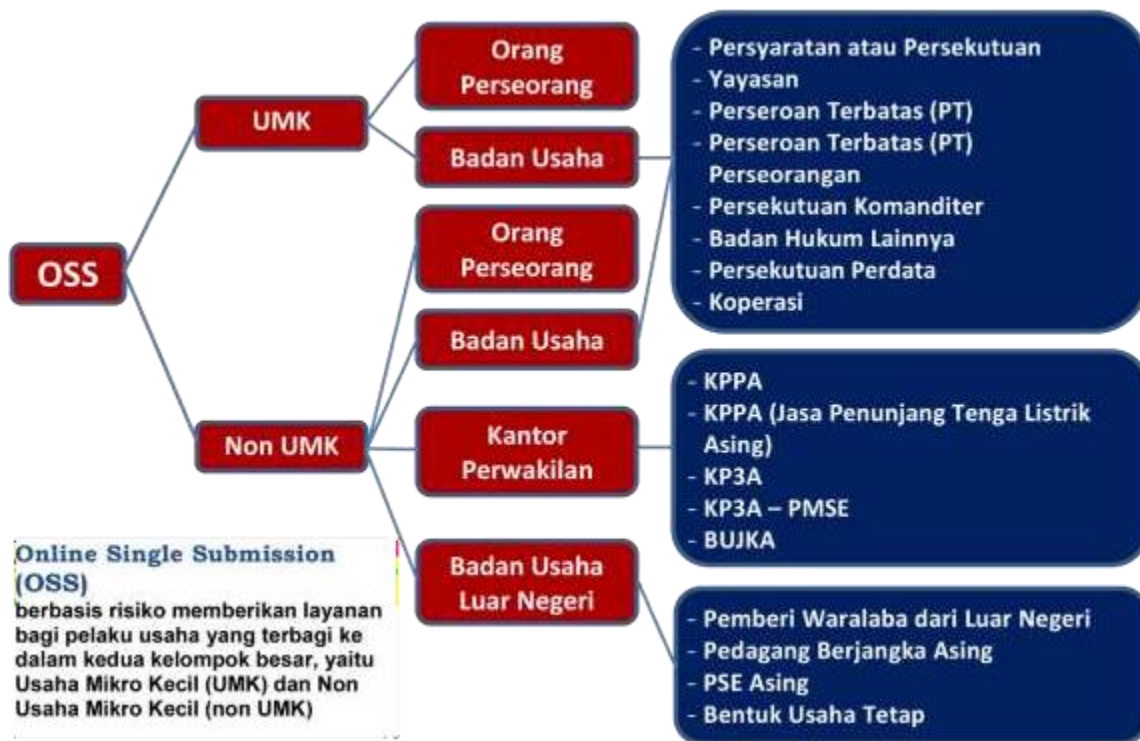
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) 2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA) 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum 4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan



B. Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)
berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK)

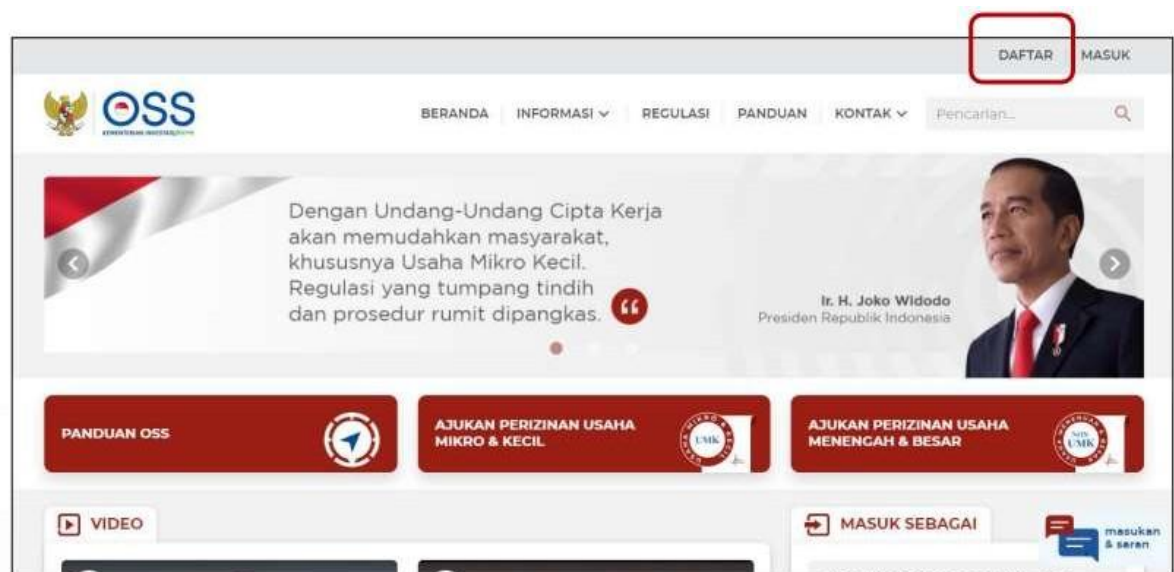
C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha Non UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Masukkan **Kode Verifikasi**
7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password Baru**
8. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha**
9. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
10. Pendaftaran **Berhasil**
11. Hak Akses Anda **siap digunakan** untuk masuk ke system OSS

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih Skala Non UMK

Siapaah Anda ?

PENTING! Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan Masuk menggunakan [username/email](#) dan [password](#) lama. **Masuk Sekarang**

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
Usaha Menengah: Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha Besar: Usaha usaha milik Perorangan Asli Asli (PMA) atau Perorangan Asli Asli (PMA) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Kantor Perwakilan: Cabang/ perwakilan orang-orang Indonesia yang akan badan usaha yang merupakan perwakilan badan usaha dari luar negeri dengan perantaraan perwakilan kantor di wilayah Indonesia.
Badan Usaha Luar Negeri: Badan usaha yang yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha di wilayah Indonesia yang bidang usahanya.

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Kembali Lanjut

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data jika sebagai **Non UMK (Orang Perseorangan)**

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha
Orang Perseorangan

Nomor Nomor Seluler
+62 8125255255

Nama Email
ijicoba@gmail.com

Partisipasi alamat email dan nomor telepon seluler Anda sudah benar.

Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Kembali Lanjut

- Pilih Jenis Pelaku Usaha **Orang Perseorangan**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Telepon Seluler
 2. Alamat *Email*
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui Email**

6. Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)

Kode Verifikasi telah terkirim ke Email Anda.
Silakan periksa Email Anda di perorangpact@jocmail.com.

Tutup

Verifikasi Email

Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke Email Anda

Perbarui Kode

- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *email*

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha
Orang Perseorangan

Nomor Telepon Seluler
+62 8125259485

Alamat Email
standforfighting@gmail.com

Pastikan alamat email dan nomor telepon seluler Anda sudah benar.

Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Password Baru
RIFANDA YUI IO

Ulangi Password

Kata Sandi

Kembali Konfirmasi

- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Buat **Password Baru**
- **Password** yang dimasukkan **minimum 8 karakter**, **kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka**, dan **karakter spesial (!@#\$%^&*_-)**
- Ulangi **Password**
- Klik **Konfirmasi**

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Nomor induk Kependudukan
35780740774000

Jenis Kelamin
Laki-laki

Tanggal Lahir
14-07-2074

Alamat
JALAN

Provinsi
Bali

Kabupaten/Kota
Kab. Clayton

Kecamatan
Clayton

Kelurahan/Desa
Clayton

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, serta bersedia data pribadi tersebut digunakan oleh Lembaga OSS - Kementerian Perencanaan RPKN untuk digunakan sesuai peruntukannya.

Kembali Daftar

- Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**
- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

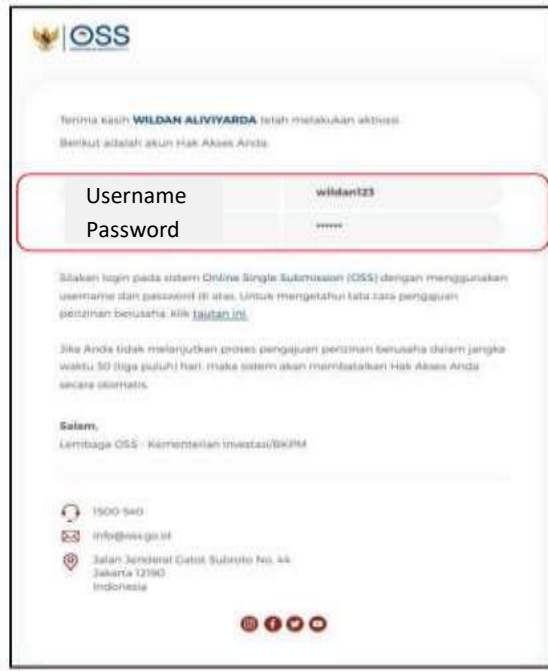
9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk melihat Rincian akun OSS

10. Cek email Anda untuk mengetahui *username* dan *password*



11. Akun **Siap digunakan** untuk masuk ke **sistem OSS**



D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**
7. Isi Data **Pemilihan Bidang Usaha**
8. Lengkapi **Data Detail Usaha**
9. Lengkapi **Data Produk/Jasa**
10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
11. Periksa **Data Usaha**
12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
13. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
15. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**
16. **Perizinan Berusaha** terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke *e-mail* yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**

5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**

6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama
 3. Jenis Kelamin
 4. Tempat/Tanggal Lahir
 5. Nomor Telepon
 6. Alamat Sesuai KTP
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 2. Email
 3. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? (Jika **Ya**, isi nomor **BPJS Ketenagakerjaan**)
 4. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan? (Jika **Ya**, isi nomor **BPJS Kesehatan**)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.
- Klik tombol **SIMPAN DATA**.
- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA**.

7. Lengkapi Data Bidang Usaha

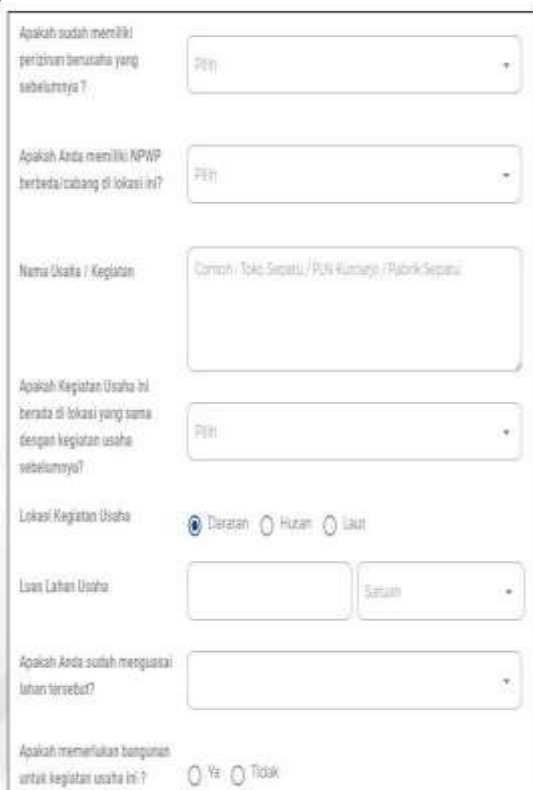


Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
 2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

8.1. Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di DARAT



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
 7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?
(**Setelah** memilih, akan **muncul pilihan** terkait **Status Lahan Usaha** dan **pilih yang sesuai**)
 8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**)
(Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBC/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**)

Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota? Ya Tidak

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten / Kota

Mode Peta

Tipe gambar peta

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?
 - Alamat Usaha
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota
 - Jika **Kabupaten/Kota terpilih ada Kawasan**, akan muncul pilihan terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan (KI, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.**
 - Jika **Kabupaten/Kota terpilih tidak ada Kawasan**, akan muncul **Kecamatan dan Kelurahan/Desa**, lalu pilih yang sesuai.
 - Kode Pos
 - Tipe Gambar Peta
 - Jika **Point**, maka **isilah titik Latitude dan Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.
 - Jika **Polygon**, maka **unggah file polygon** dalam **format SHP Complete.**

Tipe gambar peta

Tentukan titik lokasi dengan mengklik koordinat dalam peta atau mengisi kolom latitude dan longitude.

Latitude

Longitude

- Jika **Point**, maka **isilah titik Latitude dan Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.

Tipe gambar peta

Apakah usaha memiliki file Polygon?

Lampirkan File Polygon

Polygon

```
106.79215258900007 -6.57498312999994 106.79215258900007
05 -6.57501687999994 106.79214123000007 -6.57502410959
966 106.79214771000005 -6.57504468999994 106.7921489220
0008 -6.57505848999997 106.79214944200004 -6.57508342
1999967 106.79214825400006 -6.5751101608999725 106.79214
```

- Jika **Polygon**, maka **unggah file polygon** dalam **format SHP Complete.**

Apakah lokasi usaha sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan ketentuan:

KBLI	:	S5119
Luas lahan yang diertipal	:	4855 M2
Koefisien Dasar Bangunan	:	70
Koefisien Lantai Bangunan	:	2,1
Ketentuan Tata Bangunan	:	
Pertimbangan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	:	
Informasi tambahan (jika ada)	:	Pribahasa harus sesuai dengan standar teknis setempat untuk kebutuhan parkir dan bangunan perdagangan (jasa skala BNP atau di atasnya, maksimal ketinggian 25 meter (lantai dengan 5 lantai)
Jarak Sempadan Bangunan	:	Jalan Arteri Primer : 5 Jalan Kolektor Sekunder : 3,5 Jalan Lokal Primer : 3 Jalan Lokal Sekunder : 2 Jalan Lingkungan : 1
Jarak Bebas Bangunan	:	-
Koefisien Dasar Hijau	:	10
Koefisien Tapak Basemen	:	-
Jampan Utilitas Kota	:	-

Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Anda?

Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional ?

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional? (Jika Ya, maka unggah **File Keputusan Objek Vital Nasional.**)
- Lalu klik tombol **CEK RDTR dan Kegiatan.** (jika ada)
 - Jika **lokasi usaha tersedia RDTR**, kegiatan usaha dan lokasi **sesuai RDTR**, maka akan **muncul notifikasi ketentuan-ketentuan** dalam RDTR yang Anda pilih dan jika **sudah sesuai** maka dapat klik tombol **LANJUT.**
 - Jika **lokasi usaha tersedia RDTR**, sedangkan **kegiatan usaha dan lokasi TIDAK sesuai RDTR**, maka Anda **harus mengubah KBLI atau lokasi usaha** dengan klik tombol **BELUM.**
 - Jika **lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR**, maka akan **muncul pertanyaan** terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah Rp 0

Bangunan / Gedung Rp 0

Mesin / Peralatan Dalam Negeri Rp 0

Mesin / Peralatan Impor Rp 0

Mesin / Peralatan Rp 0

Investasi Lain / Lain Rp 0

Total Modal Tetap Rp 0

Modal Kerja 3 Bulan Rp 0

Total Nilai Investasi Rp 0

VALIDASI RISIKO

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan / Gedung
 - Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin / Peralatan Impor
 - Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

Skala usaha Anda akan bergantung di sebuah Menengah, Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Rendah.

Deskripsi Kegiatan Usaha: [Dropdown]

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi: [Dropdown]

Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki): 0

Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan): 0

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 0

Jumlah Tenaga Kerja Asing: 0

TAMBAH PRODUK/JASA

No	Kategori	Satuan	Jenis Produk
[Empty Table]			

Waktu di data produk/jasa untuk melengkapi proses pengisian data usaha

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Deskripsi Kegiatan Usaha
 - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 - Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 - Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 - Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

8.2. Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di HUTAN

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? Rp 0

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? Rp 0

Nama Usaha / Kegiatan: Contoh: Toko Sepatu / R/N Kustager / Perak Sepatu

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Rp 0

Lokasi Kegiatan Usaha: Daratan Hutan Lain

Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya? Rp 0

Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan: Rp 0

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 - Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 - Nama Usaha / Kegiatan
 - Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 - Lokasi Kegiatan Usaha
 - Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

- a) Jika pilih **Penggunaan / Pelepasan**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Penggunaan / Pelepasan**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?
- b) Jika pilih **Pemanfaatan / Konservasi**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Pemanfaatan / Konservasi**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Luas Lahan Usaha Semua ▾

Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? Ya Tidak

Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota? Ya Tidak

Keterangan:
Lahan kegiatan usaha dalam satu hamparan melewati batas administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Contoh:
- Lokasi usaha perkebunan dalam satu hamparan berada di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.
- PTBU beberapa dalam satu hamparan berada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**)
(Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**)
3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Alamat Usaha
2. Provinsi
3. Kabupaten / Kota
(Jika **Kabupaten/Kota yang terpilih ada Kawasan**, akan **muncul pilihan** terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan?** dan **Nama Kawasan**, lalu pilih yang sesuai.)
4. Kecamatan (jika ada)
5. Kelurahan / Desa (jika ada)
6. Kode Pos

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah Rp 0

Bangunan / Gedung Rp 0

Mesin / Peralatan Dalam Negeri Rp 0

Mesin / Peralatan Impor Rp 0

Mesin / Peralatan Rp 0

Investasi Lain-Lain Rp 0

Total Modal Tetap Rp 0

Modal Kerja 3 Bulan Rp 0

Total Nilai Investasi Rp 0

VALIDASI RISIKO

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan / Gedung
3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin / Peralatan Impor
5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
6. Investasi Lain-Lain
7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
8. Modal Kerja 3 Bulan
9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)

- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

8.3. Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**)
(Pertanyaan ini akan muncul pada **pengisian proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan Satuannya
 2. Kedalaman Lokasi dan Satuannya
 3. Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
 4. Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
 5. Nama Perairan
 6. Provinsi
(Akan **muncul kolom Proyek Strategis Nasional** pada beberapa **Provinsi tertentu**. Lalu, jika pilih 'Ya' termasuk **Proyek Strategis Nasional**, akan **muncul** kolom selanjutnya yang berisi **Pilih Daftar Proyek Strategis Nasional** dan **Upload Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (opsional)**)
 7. Koordinat
(Unggah **file koordinat Polygon** dalam bentuk **excel**)
 8. Apakah lokasi lintas provinsi?

- Jika pilih **Ya** pada pertanyaan **'Apakah lokasi lintas provinsi?**, maka akan **muncul data lintas provinsi beserta alamatnya**.
- Klik tombol **Tambah Provinsi** untuk menambahkannya.
- Sistem akan menampilkan **Form Lintas Provinsi** dan data yang harus Anda lengkapi:
 1. Posisi Lokasi (Pilih lintas **Daratan** atau **Laut**)
 2. Provinsi
 3. Alamat
 4. Kabupaten / Kota
 5. Kecamatan
 6. Kelurahan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

9. Lengkapi Data Produk/Jasa



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih "**Lainnya**", akan **muncul kolom free text** dan **isi** sesuai **produk/jasa** yang dilakukan pada **bidang usaha/KBLI** terpilih.)
 2. Kapasitas (per Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**.

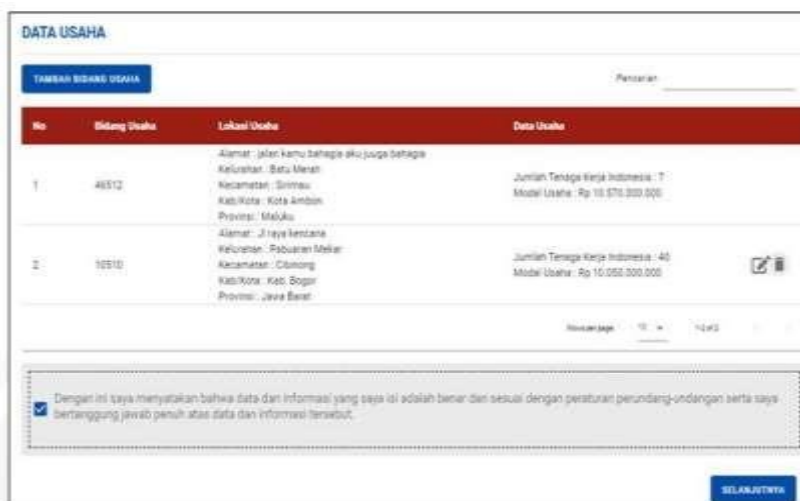
10. Periksa Daftar Produk/Jasa



No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk
1	2	Gelang	gelang

- Sistem akan menampilkan:
 1. Kapasitas
 2. Satuan
 3. Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

11. Periksa Data Usaha



No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	46512	Alamat: jalan katu bahaga aku juga bahaga Kelurahan: Batu Merah Kecamatan: Simau Kab/Kota: Kota Ambon Provinsi: Maluku	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 7 Modal Usaha: Rp 10.570.000.000
2	10510	Alamat: Jl raya kencana Kelurahan: Babuan Melar Kecamatan: Cimang Kab/Kota: Kec Dogri Provinsi: Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 40 Modal Usaha: Rp 10.050.000.000

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

- Sistem akan menampilkan data:
 1. Bidang Usaha (**KBLI**)
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja** dan **Modal Usaha**)
- Klik **kotak centang/checkbox**
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha (Untuk Lokasi Usaha Yang Perlu Verifikasi KKPR)

12.1. Daftar kegiatan usaha

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	24102	Alamat : Jl. Flamboyan No. 23 Kelurahan : Pusat Kecamatan : Medan Kota Kab/Kota : Kota Medan Provinsi : Sumatera Utara	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10 Modal Usaha : Rp 32.000.000.000	Usaha Besar	Menengah Rendah		PKKPR dalam proses verifikasi

- Jika **lokasi usaha** yang dimohonkan **tidak berada** pada wilayah yang sudah **memiliki RDTR** atau **bukan di Kawasan Industri/KEK/KPBPB** atau **tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021**, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis **"PKKPR dalam proses verifikasi"** dan Pelaku Usaha **perlu** melalui proses **Pemenuhan Persyaratan** pada menu yang sudah disediakan (dapat dilihat pada **langkah 14**).
- Tahapan ini juga berlaku sama untuk **lokasi usaha di Hutan** dan **Laut**, dengan kondisi berikut:
 - a) Untuk **lokasi usaha di Hutan**, dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (**Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/Pelepasan Kawasan Hutan**) oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**.
 - b) Untuk **lokasi usaha di Laut**, dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (**Persetujuan KKPR Laut**) oleh **Kementerian Kelautan dan Perikanan**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

12.2. Periksa daftar kegiatan usaha

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	3080	Alamat : Jl. Merdeka Blok A Kelurahan : Sibuhuta Kecamatan : Waringin Kab/Kota : Kota Serang Provinsi : Banten Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 50 Permodalan dan Permodalangan Tingkat : Rp 100.000.000 Bangunan Gedung : 1000-0001000 Mesin / Peralatan Dalam negeri : 0 Mesin / Peralatan Import : 0 Investasi Lini - lain : 0 Modal Kerja & Bahan : 0 Salah satu investasi : 10000000000 Sifat Proyek : Pendukung Luar Negeri : 4000 dan	Usaha Mikro	Menengah Rendah		PKKPR sudah Diverifikasi

- Sistem akan menampilkan:
 1. KBLI
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha
 4. Skala Usaha
 5. Tingkat Risiko
 6. Pernyataan Mandiri
 7. Status

- Jika **KKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui**, Anda dapat melanjutkan proses permohonan dengan klik tombol ikon "V".
- Lalu klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan Non UMK **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan Non UMK **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?

Pilih

BATALKAN LANJUT

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **"Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?"** yang harus Anda pilih:
 - a. Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
 - b. Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?

Pilih
Sudah

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan

Pilih

BATALKAN LANJUT

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul kolom pilihan** dan pilihlah **jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (**langkah 14**) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

BATALKAN LANJUT

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **"Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan **menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami, dan klik **kotak centang/checkbox** pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

15. Periksa Draft Perizinan Berusaha

- Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

16.4. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak SS)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB → Usaha Resiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar → Usaha Resiko Menengah Rendah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 2. Loket pelayanan Front Office; 3. Loket pelayanan penyerahan izin; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 6. Ruang Menyusui; 7. Taman; 8. Mushola; 9. Kursi Roda; 10. Toilet; 11. Help Desk (Informasi); 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 13. Komputer dan Printer; 14. Telepon dan Faksimili; 15. Mesin Fotocopy; 16. Lemari dokumen; 17. Meja dan Kursi; 18. Alat Tulis Kantor; 19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 20. Media Informasi layanan Scan QR Code; 21. Sistem dan informasi Antrian; 22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 23. Website dan Email; 24. Internet (Wifi); 25. Kamera (CCTV); 26. Pengukur Suhu; 27. Ruang server.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpmpptsplawi@gmail.com; 3. Website : dpmpptsplawi.tegalkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id/ 5. Pengaduan dan Kuesioner online

		<p>https://eimb.tegalkab.go.id/formpengaduan Telepon/Whatsapp dengan nomor 085725266206</p> <p>6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, Aktual, Profesional (MANTAP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL,



MOH. SOLEH